**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya (Todaro, 2004:21).

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu Negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan itu sendiri dapat diartikan sebagai gambaran mengenai dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi. Menurut Boediono (1999:8), pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikna *output* per kapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002:5). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerjadan memberikan kehidupan yang layak sebagaimana tujuan awal didirikan Negara ini adalah memajukan dan meningkat kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003 dalam Ravi, 2010).

Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu.

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional Negara Rebuplik Indonesia dan pemberlakuan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan bisa memotifasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah (Jhingan, 1999 dalam Yunarko, 2007). Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto perkapita (PDRB) perkapita (Zaris, 1987:82).

Bagi Negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi.dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana unyuk pembangunan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan meningkatkan investasi.

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Suryono, 2010:16).

Ditinjau dari sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Bantaeng mempunyai kemungkinan yang sangat besar untuk aktifitas penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) karena banyaknya tersedia berbagai bahan mentah dari berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan dan juga potensi daerah yang dijadikan objek wisata sehingga potensi-potensi daerah ini diberdayakan maka sangat besar manfaatnya dalam menghasilkan devisa Negara dan juga menunjang terciptanya kegiatan ekonomi disekitar daerah tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Untuk terciptanya ekonomi yang berkembang di Kabupaten Bantaeng maka pembangunan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantaeng harus mampu memanfaatkan seluruh dana yang ada untuk pembangunan ekonomi. Dalam hal untuk menggerakkan dan memajukan pemasukan daerah, pemerintah Kabupaten Bantaeng berkewajiban untuk memakai dana sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan semaksimal dan seefisien mungkin. Pembangunan daerah di Kabupaten Bantaeng diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru yang sesuai dengan kemampuan daerah ini untuk menyerap tenaga kerja lokal untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal untuk meningkatkan pendapatan didaerah Kabupaten Bantaeng dibutuhkan peran serta sektor swasta dan peningkatan partisipasi tenaga kerja lokal sebagai modal untuk membangun daerah ini.. Sebagai pedoman perencanaan guna meningkatkan pembangunan di daerah Kabupaten Bantaeng pemerintah harus menggunakan metode pembangunan dari bawah ke atas agar pembangunan ekonomi di daerah ini bisa berkelanjutan dan sesuai dengan harapan kita semua.

Pertumbuhan ekonomi berarti pembangunan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Namun untuk mencapai tingkat perekonomian yang tinggi tidaklah begitu mudah. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan berbagai faktor pendukung sperti sumber daya alam yang tersedia, stabilitas nasional, belanja pemerintah yang tercantum pada APBD dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdasarkan urain diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantaeng”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat investasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng ?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng ?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat invcstasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja secara simultan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng?
5. **Tujuan Penelitian**
6. Untuk mengetahui pengaruh tingkat investasi secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.
7. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.
8. Untuk megnetahui pengaruh tenaga kerja secara parisal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.
9. Untuk mengetahui pengaruh tingkat invcstasi, belanja pemerintah, dan tenaga kerja secara simultan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantaeng.
10. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
2. Bagi Penulis. Sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis. Sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam terutama pada bidang yang diteliti.
3. Bagi Lembaga. Sebagai bagian pemenuhan dan referensi atau bahan rujukan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut apabila ada penelitian sejenis berikutnya.
4. **Manfaat Praktis**
5. Bagi perusahaan. Diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
6. Bagi pembaca. Sebagai referensi dan acuan yang dapat dipakai untuk peneltian lebih lanjut serta menjadikan input untuk menambah wawasan dan pengetahuan apabila ada penelitian sejenis berikutnya